

## SUBSIDI ENERGI: TANTANGAN PENYALURAN BBM, LPG 3 KG, SERTA DUKUNGAN TERHADAP KENDARAAN LISTRIK

### *ENERGY SUBSIDY: RESPONDING TO THE CHALLENGES OF DISTRIBUTION OF BBM, 3 kg LPG, AND SUPPORT FOR ELECTRIC VEHICLES*

Qurrata A'yun<sup>1</sup>, Muhammad Heru Akhmadi<sup>2</sup>, Erlita Nurma Wati<sup>3\*</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya,  
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

<sup>3</sup>Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: erlitanurmaw@gmail.com

Diserahkan: 09/05/2024; Diperbaiki: 12/08/2024; Disetujui: 13/08/2024

DOI: 10.47441/jkp.v19i2.375

#### Abstrak

Energi hijau menjadi strategi dalam mengendalikan perubahan iklim secara global. Beberapa negara termasuk Indonesia telah mendorong pertumbuhan energi hijau dengan mengendalikan penggunaan energi fosil dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan subsidi energi pada energi fosil dan elektrik yang diberikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*), dengan teknik analisis regresi melalui Aplikasi STATA 18 dan *focus group discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan belanja subsidi energi, yaitu terjadinya penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran (*inclusion error*) yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan melalui program subsidi energi belum sesuai harapan. Meskipun demikian, terdapat beberapa solusi permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan mulai memikirkan adanya opsi subsidi terhadap kendaraan listrik.

**Kata Kunci:** Subsidi Energi, BBM, LPG 3 kg, Kendaraan Listrik

#### Abstract

*Energy by controlling the use of fossil energy while still paying attention to development policies that can have a multiplier effect on economic growth. This research aims to determine the impact of energy subsidy policies on fossil and electrical energy provided in Indonesia. This research uses a quantitative and qualitative approach (mixed method), with regression analysis techniques using the STATA 18 application and focus group discussions. The research results show that there are still several challenges faced by the government regarding energy subsidy spending, namely the lack of distribution of energy subsidies that are not on target (inclusion error), causing the poverty alleviation through this program to fail. However, several solutions exist: improve the quality of policies and start thinking about subsidy options for electric vehicles..*

**Keywords:** Energy Subsidies, Gasoline, LPG 3 kg, Electric Vehicles

## PENDAHULUAN

Belanja subsidi merupakan bagian dari Belanja Bendahara Umum Negara (BUN) yang didefinisikan sebagai alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual,

mengekspor, atau mengimpor barang atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat (PMK Nomor 62 Tahun 2023). Kemudian, menurut Undang-Undang APBN Tahun 2024, Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara.

Pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat (*purchasing power*) sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat (Soen et al. 2022). Secara umum, belanja subsidi terbagi menjadi dua jenis, yaitu subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi dapat terdiri dari tiga komponen, yaitu subsidi jenis BBM Tertentu (JBT), subsidi LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2024, rincian alokasi anggaran untuk belanja subsidi dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1. Belanja Subsidi 2023-2024 (triliun rupiah)**

Uraian	Outlook 2023	RAPBN 2024
A. Energi	185,4	185,9
1. Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg	114,5	110,0
a. Jenis BBM Tertentu	23,3	25,7
b. LPG tabung 3 kg	91,2	84,3
2. Listrik	70,9	75,8
B. Non-Energi	86,0	96,9
JUMLAH	271,4	282,7

Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Selain subsidi energi, terdapat pula belanja pemerintah pada sektor lain seperti, kesehatan dan pendidikan, yang juga memegang peranan kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Belanja kesehatan mencakup program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, sehingga dapat mencegah kemiskinan yang diakibatkan oleh beban biaya medis. Demikian pula, belanja pendidikan dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui akses pendidikan yang lebih luas dan merata, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dalam jangka panjang.

Kebijakan subsidi energi ini berkaitan erat dengan evaluasi paruh waktu RPJMN 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang diterbitkan oleh Bappenas, pada bagian kinerja pembangunan yang perlu ditingkatkan berdasarkan persepsi masyarakat dan intervensi pemerintah, dijelaskan bahwa perlu dilakukan transformasi subsidi energi serta pengendalian inflasi melalui pengelolaan subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil menjadi tantangan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Peningkatan konsumsi energi khususnya LPG akan meningkatkan ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor (Gobel et al. 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan subsidi energi menunjukkan bahwa *gap research* berkaitan dengan tantangan atau dampak subsidi energi dan perkembangannya yang berhubungan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Gobel et al. (2023) mengungkapkan dengan analisis deskriptifnya bahwa subsidi energi utamanya subsidi LPG menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan lebih terhadap pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut (Gunawan, 2024) membahas efektifitas subsidi energi dengan hasil analisisnya adalah bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan.

Qosthory (2016) menemukan bahwa subsidi energi memiliki hubungan positif signifikan terhadap indeks Gini. Hal ini disebabkan karena subsidi energi cenderung menciptakan ketidakadilan dan memperdalam tingkat ketimpangan di masyarakat. Pada sisi lain kebijakan subsidi energi memiliki potensi terhadap penurunan tingkat penduduk miskin (Paramita, Rosidah, and Suryanti, 2020). Selain itu, temuan yang kontradiktif ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait dengan subsidi energi masih diperlukan pendalaman lebih lanjut. Demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh subsidi energi terhadap kemiskinan dan melihat perkembangan kebijakan subsidi energi yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh subsidi energi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda, di mana variabel independen yang digunakan adalah belanja subsidi energi, belanja kesehatan, dan belanja pendidikan, sedangkan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin. Model matematis yang digunakan dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut.

$$\ln(Y) = \alpha + \beta_1 \ln(X_1) + \beta_2 \ln(X_2) + \beta_3 \ln(X_3) + \epsilon$$

Keterangan:

$Y$	= Jumlah penduduk miskin
$X_1$	= Belanja subsidi energi
$X_2$	= Belanja kesehatan
$X_3$	= Belanja pendidikan
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
$\epsilon$	= <i>Error term</i>

Data yang digunakan merupakan data *time series* dari kurun waktu tahun 2005-2023, yang bersumber dari *World Bank* (2023), Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengolahan data menggunakan Aplikasi STATA 18, yang memungkinkan analisis regresi dengan data *time series* dari tahun 2005 hingga 2023, sehingga hasil yang didapat dapat diandalkan untuk menguji hubungan antara belanja subsidi energi dan jumlah penduduk miskin. Selain variabel belanja subsidi energi, penelitian ini juga memasukkan variabel belanja kesehatan dan belanja pendidikan sebagai variabel independen.

Pemilihan variabel belanja kesehatan dan belanja pendidikan didasarkan pada literatur yang menunjukkan bahwa kedua variabel ini secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Belanja kesehatan dan pendidikan dianggap sebagai komponen penting dari pengeluaran pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya fokus pada subsidi energi, tetapi juga ingin melihat bagaimana pengeluaran di sektor kesehatan dan pendidikan dapat berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Selanjutnya metode kualitatif dalam penelitian ini melibatkan studi literatur dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melengkapi hasil dari temuan pada metode penelitian sebelumnya. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik dan non-akademik yang relevan, termasuk jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan subsidi energi. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan subsidi energi, tantangan implementasinya, serta perkembangan terbaru dalam konteks Indonesia.

FGD dilaksanakan dengan melibatkan para pengambil kebijakan dan analis dari Badan Kebijakan Fiskal dan dosen Politeknik Keuangan Negara STAN untuk menggali beberapa hal terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan subsidi energi. Data yang diperoleh dari FGD dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Subsidi Energi terhadap Penurunan Kemiskinan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa belanja kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan pada tingkat signifikansi 10%, sementara belanja subsidi energi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah melalui pengeluaran di sektor kesehatan dan pendidikan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan subsidi energi.

Adapun rincian hasil analisis regresinya adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi**

<i>Var.</i>	<i>Coeff.</i>	<i>t-Stat</i>	<i>Prob.</i>
<i>ln</i> Belanja Subsidi Energi	0,0679338	0,40	0,695
<i>ln</i> Belanja Fungsi Kesehatan	-0,4840197	-3,48	0,003
<i>ln</i> Belanja Fungsi Pendidikan	-0,5302797	-2,02	0,062
Constant	46,97946	7,70	0,000
R-Squared		0,8824	
Prob>F		0,0000	

*Sumber: data sekunder yang diolah (2024)*

Apabila dijabarkan dalam bentuk persamaan, maka data ini akan menghasilkan model sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \ln \text{ Jumlah Orang Miskin} &= 46,97946 + 0,0679338 \ln \text{ Belanja Subsidi Energi} \\ &- 0,4840197 \ln \text{ Belanja Fungsi Kesehatan} \\ &- 0,5302797 \ln \text{ Belanja Fungsi Pendidikan} \end{aligned}$$

Analisis ini mengungkapkan bahwa belanja subsidi energi memiliki dampak yang bernilai positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,0679338 dengan nilai  $|t \text{ stat}| = 0,40$  dan nilai probabilitas = 0,695 >  $\alpha = 0,05$ . Artinya, belum cukup bukti bahwa alokasi belanja subsidi energi mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Delvia & Aliasuddin (2020), yang menyatakan bahwa pengurangan subsidi energi tidak secara langsung berdampak pada kemiskinan, karena rendahnya penggunaan energi di kalangan masyarakat miskin. Meskipun demikian penelitian lainnya, Sari & Marissa (2023) menemukan belanja subsidi energi dan belanja hibah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, belanja kesehatan dan belanja pendidikan bernilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Hasil regresi belanja kesehatan yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,4840197 dengan nilai  $|t \text{ stat}| = 3,48$  dan nilai probabilitas = 0,003 <  $\alpha = 0,05$  yang artinya belanja kesehatan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan. Hasil regresi belanja pendidikan yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,5302797 dengan nilai  $|t \text{ stat}| = 2,02$  dan nilai probabilitas = 0,062.

Hal ini sejalan dengan penelitian Melati *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa belanja pendidikan dan belanja kesehatan memiliki pengaruh terhadap turunnya angka kemiskinan.

Hasil ini penting untuk diperdalam pada konteks kebijakan, karena menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor kesehatan dan pendidikan mungkin akan memberikan dampak yang lebih langsung terhadap penurunan kemiskinan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam alokasi anggaran pemerintah, dengan mempertimbangkan pengeluaran di sektor yang terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor prioritas nasional khususnya pada alokasi belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui investasi pada sumber daya manusia. Sepanjang periode 2005-2023, alokasi belanja pendidikan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan tumbuh positif. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui alokasi anggaran yang lebih besar setiap tahunnya. Peningkatan tajam pada tahun 2023 mencerminkan adanya kebijakan besar atau program yang diluncurkan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memenuhi target alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi.



**Gambar 1. Alokasi belanja pendidikan 2005-2023**  
 Sumber: LKPP (Diolah Penulis, 2024)

Hal yang berbeda terdapat pada alokasi belanja kesehatan, di mana menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2021. Puncak alokasi belanja kesehatan pada tahun 2021 terkait dengan respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19, yang membutuhkan alokasi anggaran besar untuk penanganan kesehatan masyarakat, vaksinasi, dan dukungan lainnya. Penurunan setelah puncak ini mencerminkan penyesuaian pasca-pandemi, dengan anggaran yang kembali dialokasikan sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang lebih stabil.



**Gambar 2. Alokasi belanja kesehatan 2005-2023**  
 Sumber: LKPP (Diolah Penulis, 2024)

### Dampak Subsidi Energi terhadap Ruang Fiskal Pemerintah

Kebijakan pembatasan belanja subsidi energi yang dilakukan justru tidak memberi pengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi (Hazmi et al. 2021) Meskipun demikian, kebijakan kontrol optimal terhadap belanja subsidi energi dapat menjadi solusi dalam kondisi defisit fiskal dan pertumbuhan utang yang berlebihan. Alokasi belanja subsidi energi dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren yang fluktuatif. Adapun peningkatan alokasi belanja subsidi menyebabkan semakin menyempitnya celah fiskal. Pergerakan alokasi belanja dari tahun 2005 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3. Alokasi belanja subsidi energi 2005-2023**

*Sumber: LKPP (Diolah Penulis, 2024)*

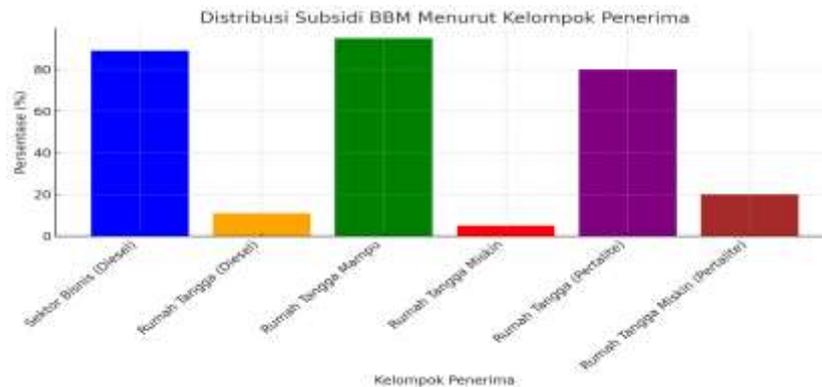
Grafik alokasi belanja subsidi energi dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode tersebut. Peningkatan tajam terlihat pada beberapa tahun, seperti pada 2008 dan 2013-2014, mencerminkan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga energi di tengah meningkatnya harga minyak dunia dan faktor ekonomi lainnya. Penurunan tajam setelah 2014 mencerminkan langkah-langkah reformasi subsidi energi yang diambil oleh pemerintah, termasuk pengurangan subsidi BBM dan pengalihan subsidi ke program-program yang lebih tepat sasaran. Pada tahun-tahun berikutnya, tren peningkatan kembali terlihat, yang menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan subsidi serta respons terhadap dinamika harga energi global dan domestik.

### Kebijakan Distribusi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Publikasi yang dilakukan oleh Pertamina (2022) mengindikasikan adanya pola penyalahgunaan dalam mekanisme distribusi bahan bakar minyak yang bersubsidi. Fenomena ini umumnya termanifestasi dalam bentuk akumulasi stok yang tidak sah dan aliran distribusi ilegal menuju entitas yang tidak memenuhi syarat penerimaan subsidi tersebut.

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2022, beliau menegaskan bahwa pendekatan proses distribusi subsidi bahan bakar minyak yang bersubsidi yang diambil saat ini tidak mengenai sasaran yang diinginkan. Menteri keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi untuk bahan bakar diesel, sekitar 89%, dinikmati oleh sektor bisnis, sementara hanya sebagian kecil, yaitu 11%, yang sampai ke rumah tangga. Lebih jauh, dari jumlah terbatas subsidi yang mencapai rumah tangga, mayoritasnya, atau 95%, dinikmati oleh rumah tangga yang lebih mampu secara finansial. Ini meninggalkan hanya 5% dari subsidi yang diakses oleh rumah tangga miskin yang membutuhkannya lebih, seperti keluarga petani dan nelayan. Dalam hal subsidi untuk Peralite, jenis bahan bakar minyak bersubsidi lainnya, pembagiannya juga tampak timpang. Sekitar 86% digunakan oleh rumah tangga, namun, dari ini, hanya 20% yang mencapai rumah tangga miskin, sementara sebagian besar, atau 80%, digunakan oleh rumah tangga yang tidak membutuhkan bantuan finansial tersebut. Melalui penjelasannya, Menteri Keuangan menekankan perlunya reformasi dalam sistem subsidi bahan bakar

untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan bukan hanya menjadi keuntungan tambahan bagi yang sudah berkecukupan.



**Gambar 4. Distribusi subsidi BBM menurut kelompok penerima**  
 Sumber: Tempo (data sekunder yang diolah, 2024)

### Kebijakan Subsidi Liquid Petroleum Gas (LPG)

Sejak tahun 2008, dalam rangka mendukung inisiatif penggantian minyak tanah bersubsidi dengan LPG dalam kemasan tabung berkapasitas 3 kilogram, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran khusus untuk subsidi LPG tersebut. Menurut *Outlook APBN TA 2023*, belanja subsidi LPG tabung 3 kg telah menjadi komponen terbesar dalam subsidi energi di tahun 2023, yang mencapai Rp 91,2 triliun. Selanjutnya, berdasarkan RABPN TA 2024, subsidi LPG tabung 3 kg tetap menjadi komponen terbesar, dengan nilai Rp 84,3 triliun.

Analisis yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (2020) mengungkap berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi untuk LPG tabung 3 kg. Isu-isu ini mencakup beberapa aspek seperti desain kebijakan, pengelolaan anggaran dan proses distribusi. Dalam hal desain kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg, masalah utama terletak pada: (a) lemahnya akurasi dalam menentukan target penerima, (b) kurangnya data yang valid mengenai penerima subsidi LPG, dan (c) belum adanya penyesuaian pada Harga Jual Eceran (HJE) untuk LPG bersubsidi. Dalam pengelolaan anggaran subsidi LPG tabung 3 kg, terdapat: (a) ketidakcocokan antara kuota yang ditetapkan dengan konsumsi sebenarnya; (b) ketidakpastian dalam penetapan kebutuhan anggaran, dan (c) beban fiskal yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Terkait dengan distribusi LPG tabung 3 kg, isu yang dihadapi meliputi: (a) keterbatasan dalam distribusi dan persaingan di pasar, (b) kendala dalam pengendalian dan pemantauan distribusi produk; (c) kegagalan dalam membatasi penerima manfaat yang tidak sesuai (*inclusion error*); dan (d) variasi harga yang signifikan di tingkat pengecer.

Selanjutnya, Effendi (2023) menyatakan bahwa subsidi LPG 3 kg bersifat regresif, artinya tidak tepat sasaran dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Data rasio manfaat per total (%) efektifitas subsidi LPG 3 kg menunjukkan bahwa hanya 5,9% dari total subsidi LPG 3 kg yang dinikmati oleh 10% kelompok termiskin di Indonesia, sedangkan sisanya dinikmati oleh kelompok selain itu. Lebih jauh, 8,2% subsidi LPG 3 kg bahkan dinikmati oleh 10% kelompok terkaya di Indonesia.

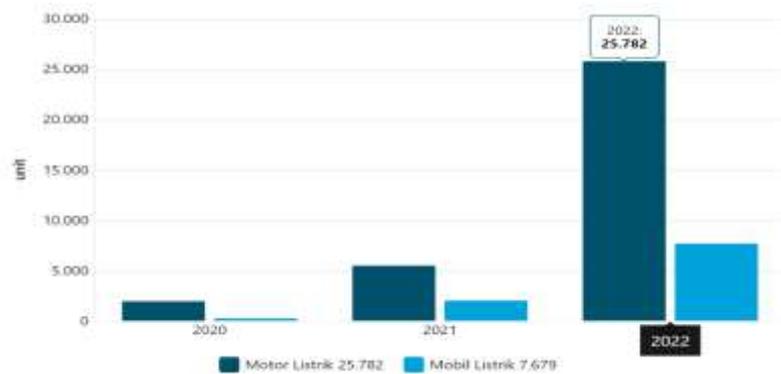


**Gambar 5. Distribusi subsidi LPG 3 kg berdasarkan kelompok konsumen**  
*Sumber: data primer yang diolah (2024)*

### Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Meskipun subsidi kendaraan listrik bukan merupakan salah satu bagian dari subsidi energi, namun di masa depan subsidi yang mendukung penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi salah satu opsi subsidi yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Inisiatif kebijakan subsidi kendaraan listrik sendiri bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dalam sektor kendaraan listrik, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan mempercepat transisi dari energi fosil ke energi listrik. Dengan demikian, langkah ini diharapkan tidak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam penggunaan subsidi energi.

Publikasi yang dilakukan oleh Databoks (2023) berdasarkan hasil Riset Deloitte dan Foundry menyatakan data jumlah kendaraan listrik di Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut.



**Gambar 6. Jumlah Kendaraan Listrik di Indonesia (2020-2022)**  
*Sumber: Katadata (2023)*

Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan oleh penulis bersama para peneliti dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, diperoleh kesimpulan bahwa subsidi kendaraan listrik senilai Rp7.000.000,00 untuk setiap pembelian motor listrik belum mampu mendorong permintaan motor listrik sesuai yang telah ditargetkan. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh Databoks (2023) terdapat sejumlah hambatan yang membuat masyarakat Indonesia masih ragu untuk beralih ke motor listrik. Hambatan tersebut diantaranya kesulitan untuk menemukan stasiun pengisian daya, harga motor listrik yang masih mahal, hingga jarak tempuh yang masih terbatas. Namun, di awal tahun

2024, pemerintah menambah subsidi untuk kendaraan listrik hingga mencapai Rp10.000.000,00 untuk setiap pembelian motor listrik, dengan memperluas cakupan kelompok masyarakat penerima subsidi menjadi (1) Perseorangan; (2) Kelompok masyarakat; (3) Lembaga pemerintah; dan (4) Lembaga non-pemerintah.

**Pilihan Pembatasan BBM Jenis Khusus**

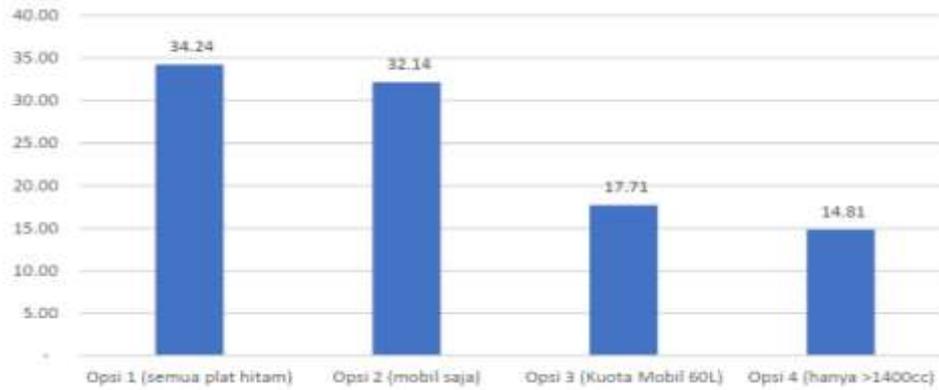
Mengingat situasi subsidi bahan bakar minyak sering kali tidak tepat sasaran, maka ada urgensi bagi pemerintah untuk mengklasifikasikan secara spesifik jenis kendaraan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akses ke Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan (JBKP). Studi yang dilakukan oleh Institute for *Development of Economics and Finance* (INDEF 2023) menyarankan beberapa strategi yang dapat di adopsi oleh pemerintah, diantaranya adalah: (a) melarang seluruh kendaraan dengan plat hitam, kendaraan dinas, dan sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc dari daftar penerima subsidi; (b) hanya kendaraan dengan plat hitam dan kendaraan dinas yang tidak dapat menerima subsidi; (c) Strategi ketiga, membolehkan kendaraan dengan plat hitam, kendaraan dinas, dan sepeda motor di atas 150 cc untuk menggunakan JBKP tetapi dengan pembatasan kuota; dan (d) kendaraan dengan plat hitam yang memiliki kapasitas mesin di atas 1400 cc, kendaraan dinas, dan sepeda motor di atas 150 cc akan dimasukkan dalam daftar negatif yang tidak berhak atas subsidi (lihat Tabel 3).

**Tabel 3. Alternatif Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi dan Kompensasi**

Jenis Kendaraan	Negative List			
	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Mobil Plat Hitam	Semua plat hitam	Semua plat hitam	Kuota semua plat hitam	Mobil > 1.400 cc
Mobil Dinas	Semua mobil dinas	Semua mobil dinas	Kuota semua mobil dinas	Semua mobil dinas
Motor	Motor > 150 cc	-	Motor >150 cc	Motor > 150 cc

Sumber: INDEF (2023)

Berdasarkan data dari Korlantas Polri dan BPH Migas, teridentifikasi jumlah kendaraan yang termasuk dalam kategori tidak berhak menerima subsidi. Untuk strategi pertama, total kendaraan yang tidak berhak mencakup 22 juta mobil dan 6,7 juta sepeda motor; strategi kedua mengecualikan 22 juta mobil tanpa memasukkan sepeda motor; strategi ketiga memberlakukan pembatasan kuota pada keseluruhan 22 juta mobil dan 6,7 juta sepeda motor; sedangkan strategi keempat mencakup 8,7 juta mobil dan 6,7 juta sepeda motor. Data ini penting untuk mengevaluasi kemungkinan penghematan anggaran, dihitung dengan mengalikan total konsumsi BBM oleh kendaraan yang masuk dalam kategori tidak berhak dengan selisih antara harga pasar dan harga jual BBM. Konsumsi tahunan diasumsikan sebanyak 1.400 liter untuk mobil dan 300 liter untuk sepeda motor. Sementara itu, harga minyak mentah internasional diestimasi sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, yaitu 90 Dolar AS per barel, dan nilai tukar dipatok pada Rp 14.800,00 per Dolar AS. Berdasarkan kajian tersebut, diperoleh potensi penghematan fiskal, kemudahan implementasi, dan keadilan dari setiap alternatif, yaitu:



**Gambar 7. Potensi Penghematan Fiskal (dalam Triliun Rupiah)**

Sumber: INDEF (2023)

**Tabel 4. Alternatif Pembatasan BBM**

Aspek Kebijakan	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Penghematan Fiskal	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
Kemudahan Implementasi	Sedang	Mudah	Sedang	Tinggi
Keadilan	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: INDEF (2023)

Satu hal penting dalam menerapkan pembatasan pada BBM jenis khusus penugasan (JBKP) adalah untuk menjaga agar kebijakan ini tidak hanya hemat biaya, tetapi juga adil bagi semua pihak. Menggunakan teknologi seperti aplikasi *MyPertamina* bisa menjadi kunci untuk mencapai keadilan dalam pembatasan BBM JBKP. Walaupun ada beberapa kendala teknis yang menghambat aplikasi *MyPertamina* bekerja dengan sempurna, penerapan pemantauan subsidi BBM dengan bantuan teknologi ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem subsidi yang lebih terarah.

### Dampak Pembatasan BBM dan LPG terhadap Kendaraan Listrik

Pembatasan penggunaan BBM dan LPG dalam upaya mendorong adopsi kendaraan listrik merupakan salah satu strategi yang dapat diambil untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Langkah ini didorong oleh tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target-target mitigasi perubahan iklim.

Pembatasan BBM dan LPG bagi kendaraan konvensional dapat meningkatkan daya tarik kendaraan listrik bagi konsumen. Dengan mengurangi aksesibilitas dan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan berbasis BBM, kendaraan listrik menjadi alternatif yang lebih ekonomis dan menarik. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan pasar untuk kendaraan listrik, yang pada gilirannya dapat mendorong produksi, inovasi teknologi, dan penurunan biaya produksi dalam jangka panjang.

Namun, transisi ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur pengisian daya yang lebih luas dan mudah diakses. Pembatasan BBM dan LPG tanpa dukungan infrastruktur yang cukup dapat menimbulkan resistensi dari konsumen yang merasa kesulitan untuk beralih. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan ini harus disertai dengan investasi yang signifikan dalam pengembangan stasiun pengisian daya dan jaringan pendukung lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, pembatasan BBM dan LPG dapat memberikan tekanan terhadap sektor industri yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Sektor

transportasi yang sangat tergantung pada BBM, misalnya, akan mengalami peningkatan biaya operasional. Namun, jika kebijakan ini berhasil mendorong adopsi kendaraan listrik secara luas, potensi penghematan dari penurunan impor BBM serta perbaikan kualitas udara di kota-kota besar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.

### Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Energi di Beberapa Negara

Dari pengalaman internasional, dapat dipelajari bahwa reformasi subsidi LPG harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari dampak negatif, terutama dalam hal menargetkan penerima subsidi yang tepat. Beberapa negara memiliki pengalaman relevan dalam hal ini, yang dapat menjadi sumber masukan penting bagi Indonesia dalam merancang reformasi subsidi LPG.

Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan LPG berdasarkan *benchmarking* dari negara lain, yang didasarkan pada kajian oleh Toft et al. (2016) dari *Global Subsidies Initiative* (GSI) serta *International Institute for Sustainable Development* (IISD):

**Tabel 5. Benchmarking LPG Subsidy Reform**

Negara	Kebijakan	Analisis
El Salvador	El Salvador mengganti subsidi harga dengan transfer uang yang menentukan penerima berdasarkan penggunaan listrik mereka. Awalnya, subsidi ini diberikan melalui barcode pada tagihan listrik, tetapi kemudian diganti dengan sistem pembayaran baru. Dalam sistem ini, subsidi dibayarkan langsung kepada penjual LPG ketika penerima membeli LPG dengan menunjukkan identitas dan memasukkan nomor identifikasi pribadi di ponsel khusus untuk program ini. Ponsel-ponsel tersebut dibagikan kepada penjual LPG, yang juga mendapat pelatihan khusus menggunakannya. Penggunaan teknologi ponsel memungkinkan informasi tentang semua transaksi dikumpulkan secara langsung dalam sebuah basis data pusat, yang meningkatkan kemampuan pelaksanaan program. Pada tahun 2015, pemerintah melaporkan bahwa program baru ini memberikan manfaat kepada sekitar 74 persen rumah tangga.	<p><b>Positif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggunaan teknologi mobile dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menyalurkan subsidi.</li> <li>2) Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time dan mengurangi kecurangan.</li> <li>3) Pengalihan dari subsidi harga ke transfer pendapatan dapat lebih tepat sasaran.</li> </ol> <p><b>Negatif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat dan aksesibilitas yang luas.</li> <li>2) Risiko termarjinalkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan teknologi.</li> <li>3) Perlu pelatihan dan sosialisasi ekstensif untuk vendor dan pengguna.</li> </ol>
India	Pemerintah India telah menetapkan batasan pada pembelian LPG bersubsidi dan memperkenalkan sistem DBTL ( <i>The Direct Benefits Transfer for LPG</i> ), di mana konsumen membayar harga pasar untuk LPG dan menerima kompensasi melalui rekening bank mereka. Ini bertujuan mengurangi korupsi dan penggunaan LPG yang tidak tepat sasaran. Kampanye "Give it	<p><b>Positif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem transfer manfaat langsung mengurangi korupsi dan kebocoran.</li> <li>2) Pengembalian uang ke rekening bank meningkatkan transparansi dan keamanan.</li> <li>3) Membantu masyarakat memahami dan menyesuaikan konsumsi LPG</li> </ol>

Negara	Kebijakan	Analisis
	<p>"Up!" juga diluncurkan untuk mendorong rumah tangga yang mampu agar berhenti membeli LPG bersubsidi, hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dari subsidi.</p>	<p>mereka.</p> <p><b>Negatif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menuntut integrasi data LPG dan sistem perbankan yang kompleks.</li> <li>2) Potensi keterlambatan dalam pembayaran yang dapat mempengaruhi rumah tangga miskin.</li> <li>3) Memerlukan kebijakan pendamping untuk rumah tangga tanpa akses ke layanan perbankan.</li> </ol>
Meksiko	<p>Harga LPG telah dinaikkan secara bertahap tanpa adanya program kesejahteraan sosial khusus untuk meringankan dampak pada kelompok rentan. Hal ini mungkin karena Meksiko telah mengembangkan sistem jaring pengaman sosial yang komprehensif selama 18 tahun terakhir. Sistem ini termasuk program transfer tunai skala besar yang disebut <i>Oportunidades</i>, yang memiliki bagian khusus yang bertujuan membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan energi mereka.</p>	<p><b>Positif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan harga LPG secara bertahap mengurangi beban fiskal.</li> <li>2) Jaring pengaman sosial yang luas membantu meringankan dampak pada kelompok rentan.</li> </ol> <p><b>Negatif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kenaikan harga langsung dapat memberikan tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin.</li> <li>2) Tidak ada mekanisme penargetan khusus untuk subsidi LPG, yang bisa menyebabkan inefisiensi.</li> </ol>
Peru	<p>Pemerintah Peru pada tahun 2012 menciptakan <i>Fondo de Inclusión Social Energético</i> (FISE) untuk meningkatkan akses energi. Dalam skema FISE, rumah tangga penerima mendapat voucher bulanan senilai 16 soles (sekitar USD 5.70) yang mendukung pembelian isi ulang LPG pertama setiap bulan. Voucher ini diberikan melalui kode numerik pada tagihan listrik dan dapat ditukarkan melalui ponsel penerima. Penerima subsidi dapat menukarkan alokasi subsidi mereka hingga dua bulan, dan LPG harus dibeli melalui "agen LPG berwenang". Kriteria kelayakan FISE meliputi konsumsi listrik bulanan rata-rata, pendapatan rumah tangga, jenis bangunan rumah, dll. Pada tahun 2014, jumlah penerima FISE diperkirakan lebih dari 3,5 juta orang (hampir 710.000 rumah tangga),</p>	<p><b>Positif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Voucher bulanan memberikan bantuan langsung pada rumah tangga yang memenuhi syarat.</li> <li>2) Sistem voucher berbasis kode numerik memudahkan distribusi dan validasi.</li> </ol> <p><b>Negatif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengecualian rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, tetapi tetap membutuhkan dukungan.</li> <li>2) Penerapan memerlukan infrastruktur IT dan kerja sama dengan perusahaan listrik.</li> </ol>

Negara	Kebijakan	Analisis
	dan peluncurannya didukung oleh kampanye komunikasi yang komprehensif.	
Thailand	Thailand memberikan LPG bersubsidi hanya untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil dengan kriteria memiliki sambungan listrik maksimal 5 ampere dan konsumsi listrik rata-rata kurang dari 90 kWh per bulan. Konsumsi LPG dibatasi menjadi 18kg setiap tiga bulan. Sistem berbasis SMS digunakan untuk verifikasi pembelian. Namun, program ini kurang berhasil karena kompleksitas sistem dan hambatan dalam pendaftaran dan pembelian.	<p><b>Positif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembatasan yang ketat memastikan bahwa hanya kelompok target yang menerima subsidi.</li> <li>2) Sistem berbasis SMS menyederhanakan proses pendaftaran dan penebusan.</li> </ol> <p><b>Negatif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat partisipasi yang rendah menunjukkan kompleksitas dan hambatan akses.</li> </ol>

Sumber: GSI dan IISD (Data Diolah Penulis, 2023)

Dalam rangka memperoleh wawasan mendalam terkait kebijakan subsidi energi di Indonesia, penelitian ini melibatkan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh para pengambil kebijakan dan analis dari Badan Kebijakan Fiskal. Diskusi ini berfokus pada evaluasi efektivitas subsidi energi yang sedang berjalan, termasuk subsidi untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik, serta potensi dukungan terhadap kendaraan listrik. Hasil FGD mengungkapkan bahwa subsidi energi (terutama subsidi LPG 3 kg dan solar) cenderung bersifat regresif, di mana sebagian besar manfaat dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu secara finansial. Sebaliknya, program seperti PKH, BPNT, dan subsidi listrik menunjukkan karakteristik yang lebih progresif, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal inclusion error. Data efektivitas belanja dan subsidi menunjukkan bahwa program-program seperti PIP dan PBI juga menghadapi tantangan dalam mencapai target penerima manfaat yang tepat.

FGD juga membahas simulasi reformasi subsidi energi yang mencakup kenaikan harga LPG dan listrik non-subsidi serta implementasi kebijakan tambahan seperti BLT Energi. Simulasi menunjukkan bahwa reformasi ini dapat meningkatkan ruang fiskal, namun juga berpotensi meningkatkan angka inflasi dan kemiskinan jika tidak disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Hasil FGD menyarankan pentingnya penyesuaian dan reformasi kebijakan subsidi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk pemantauan dan verifikasi penerima manfaat subsidi, serta peninjauan ulang kebijakan yang saat ini dinilai tidak efektif.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### SIMPULAN

Subsidi energi dan angka kemiskinan diharapkan berada dalam satu garis lurus dan memberikan dampak kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan subsidi energi di Indonesia belum memberikan dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan dikarenakan mekanisme distribusi BBM dan LPG 3 kg belum tepat sasaran. Meski demikian, kebijakan fiskal pemerintah berupa subsidi energi dan dukungan terhadap kendaraan listrik di Indonesia diharapkan dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan

berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini mencakup tiga aspek yaitu pertama, (1) pembatasan konsumsi JBKP tidak hanya untuk kendaraan roda 4, tetapi juga diberlakukan pada kendaraan roda 2. Potensi penghematan bisa hingga Rp34,24 triliun. Pemerintah bisa mengecualikan mobil dengan kapasitas di bawah 1400cc dan motor di bawah 150cc dari pembatasan ini. Meski demikian, hal ini harus dibarengi dengan pengawasan yang efektif dan penerapan teknologi yang sesuai. BPH Migas harus bekerja sama erat dengan lembaga terkait untuk mendukung penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memperbarui dan menyinkronkan *database* untuk menghindari permasalahan seperti identitas ganda, duplikasi, atau identitas palsu; (2) Perlu reformasi subsidi LPG. Implementasi teknologi dalam distribusi subsidi harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan literasi digital di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang luas dan pendekatan inklusif agar program dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, integrasi dengan sistem perbankan dan data konsumsi listrik membutuhkan koordinasi antarlembaga seperti PLN, Kementerian ESDM dan perbankan yang efektif. Penerapan kebijakan subsidi LPG harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga atau mekanisme subsidi baru dengan menyiapkan mekanisme pendukung lain seperti jaring pengaman sosial yang perlu diperkuat untuk melindungi kelompok rentan; dan (3) dengan memberikan subsidi kendaraan listrik dan hal ini masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait penyaluran subsidi kendaraan listrik yang tepat, sehingga kedepannya subsidi ini dapat meningkatkan volume kendaraan listrik yang terjual, sembari memberikan waktu bagi industri kendaraan listrik untuk melakukan kajian dan pengembangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan penulis kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah memfasilitasi dan memberikan ruang dalam terlaksananya penelitian ini; dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan yang telah berkenan menjadi peserta FGD sehingga penulis dapat mendalami dan menganalisa kembali berkaitan subsidi energi di lihat dari berbagai aspek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. 2020. "Kajian: Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran."
- Databoks. 2023. "Riset Deloitte dan Foundry: Penggunaan Motor Listrik di Indonesia Naik 13 Kali Lipat dalam Dua Tahun." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/15/riset-deloitte-dan-foundry-penggunaan-motor-listrik-di-indonesia-naik-13-kali-lipat-dalam-dua-tahun>.
- Delvia, Puja, and Aliasuddin Aliasuddin. 2020. "Penurunan Subsidi Energi dan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 5 (3): 136–45.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI. 2023. Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi: Realisasi s.d. 31 Oktober 2023 (Hanya untuk Internal Kemenkeu). [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)
- Effendi, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Fiskal dengan Instrumen Belanja Pemerintah. Gobel, Ruddy Kaharudin, Bambang Shergi Laksmono, Martani Huseini, and Mia Siscawati. 2023. "Subsidi Elpiji Untuk Siapa? Mendorong Perbaikan Kebijakan sebagai Instrumen Kesejahteraan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 31 (1).

- Gunawan, Ridho. 2024. "Mengukur Efektivitas Subsidi Energi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *Circle Archieve* 1 (5).
- Hazmi, Yusri, Aryati Aryati, Mizan Mizan, Faisal Faisal, Ali Imran, Teuku Zulkarnain, and Intan Cahyani Rachman. 2021. "Kontrol Optimal Subsidi Energi dan Keberlanjutan Fiskal di Indonesia." *In Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 5 (1): 11–17.
- INDEF. 2023. "Indef Policy Brief No. 2/2023 Mekanisme Penyaluran BBM JBKP: Penguatan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi."
- Nota Keuangan RAPBN TA 2024. 2024. "Nota Keuangan RAPBN TA 2024."
- Paramita, Yohana, Ainur Rosidah, and Mei Suryanti. 2020. "Potensi Subsidi Energi dalam Mengurangi Kemiskinan." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4 (2): 1–10. doi:10.30601/humaniora.v4i2.979.
- Pertamina. 2022. "Sebab Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran," August 31. <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/476133/sebab-subsidi-bbm-tak-tepat-sasaran>.
- Qosthory, Mustafid Nur. 2016. "Korelasi Subsidi Energi Terhadap Indeks Gini: Studi di Delapan Negara 2007-2012." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4 (2).
- Sari, Dinar Islami, and Feny Marissa. 2023. "Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Indonesia." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 3 (2): 346–59. doi:10.54373/ifijeb.v3i2.238.
- Soen, Anugrah Stephen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus, and Supeni Anggraeni Mapusari. 2022. "Subsidi di Indonesia." *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 21 (1): 84–92. doi:10.22225/we.21.1.2022.84-92.
- Toft, Lasse, Chris Beaton, and Lucky Lontoh. 2016. "International Experiences with LPG Subsidy Reform: Options for Indonesia How Do Indonesia's LPG Prices Compare With Other Countries?" [www.givitup.in](http://www.givitup.in).
- World Bank. 2023. "Poverty Data - Indonesia." [https:// data.worldbank.org/topic/poverty?locations=ID](https://data.worldbank.org/topic/poverty?locations=ID).

